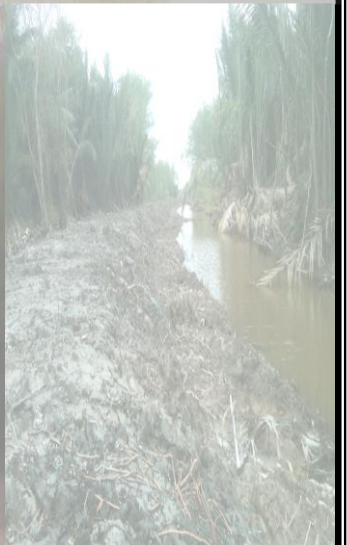


"Infrastruktur yang Baik  
untuk Meningkatkan  
Kesejahteraan Rakyat"



# LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat karunia dan izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan suatu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 dalam mengisi pembangunan ini.

Muara Sabak, Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**RISDIANSYAH, ST.MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750527 200212 1 011



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 15 (Lima Belas) Program dengan 5 (lima) sasaran program dengan indikator kinerja program sebanyak 8 (delapan) indikator. Rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100,98% yang dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap, sudah memenuhi target sebesar 61,29% dengan realisasi sebesar 70,97% dimana dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 93 desa/kelurahan terdapat 66 desa/kelurahan.
2. Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi, sudah memenuhi dari target sebesar 36% telah terealisasi sebesar 37,50% dimana dari jumlah luas sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 169,531Ha terdapat 63,574Ha
3. Persentase rekomendasi kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota, sudah mencapai 100 % dimana untuk setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian RTRW yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
4. Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi, capaian kinerja sebesar 100% atau mencapai target sebesar 85%.
5. Persentase Peningkatan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan, capaian kinerja sebesar 99,88% atau mencapai 62% dari target yang ditetapkan sebesar 64%
6. Skor IKM, capaian kinerja sebesar 102,63% atau mencapai nilai sebesar 78 dibanding dengan target sebesar 76 yang ditetapkan
7. Nilai AKIP, capaian kinerja sebesar 85,34% atau dengan realisasi sebesar 55,47 dari target sebesar 65



8. Laporan Keuangan, capaian kinerja telah tercapai 100% dengan kondisi laporan keuangan telah sesuai dengan sistem administrasi keuangan.

Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 15 Program dan 48 Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 255.870.123.816 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.603.475.816 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 250.266.648.000. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 secara umum dapat dilaksanakan semua dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 235.355.696.972 (91,98%) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.389.365.743 (96,18%) dan belanja langsung sebesar Rp. 229.966.331.229 (91,89%).



# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar .....                                  | i         |
| Ringkasan Eksekutif .....                             | ii        |
| Daftar Isi .....                                      | iv        |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>  |
| A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....        | 1         |
| B. Aspek Strategis Organisasi .....                   | 2         |
| C. Struktur Organisasi .....                          | 5         |
| D. Sistematika Penyajian.....                         | 8         |
| <br>  |           |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b> | <b>9</b>  |
| A. Rencana Strategis 2016-2021 .....                  | 9         |
| 1. Pernyataan Visi .....                              | 10        |
| 2. Pernyataan Misi .....                              | 10        |
| 3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....                 | 11        |
| 4. Program dan Kegiatan .....                         | 12        |
| 5. Sasaran Program .....                              | 14        |
| 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                | 14        |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....                | 15        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>          | <b>16</b> |
| A. Capaian Kinerja .....                              | 16        |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                     | 18        |
| C. Realisasi Keuangan .....                           | 22        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>                         | <b>26</b> |
| A. Kesimpulan .....                                   | 26        |
| B. Penutup .....                                      | 27        |

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati tersebut diatas dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan.
3. Penyelenggaran perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air.
4. Penyelenggaraan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.



5. Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan Pengawasan jasa konstruksi.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan Bupati.

## **B. ASPEK STRATEGIS**

Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi : Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air, sedangkan di Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

Maka guna meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :



**a. Bidang Bina Marga**

1. Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat.
2. Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyebabkan volume material perkerasan badan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya.
3. Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek.
4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota belum berjalan secara sinergi terutama dengan sentra aktivitas perekonomian daerah, seperti integasi jalan pertanian dengan jalan kabupaten dalam mengangkut hasil pertanian ke pusat pengolahan dan industri hilir dan sentra-sentra pemasaran.

**b. Bidang Sumber Daya Air**

1. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum berjalan optimal.
2. Belum terbentuknya komisi irigasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur tentang pengelolaan





jaringan irigasi baik untuk perkebunan, pertanian maupun jalur bisnis.

3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Belum tertatanya pengelolaan dalam hal pemanfaatan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder yang berada dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Belum maksimalnya pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Belum optimalnya dalam pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten
7. Belum optimalnya pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.

**c. Bidang Tata Ruang**

1. Belum memadainya pembinaan penataan Ruang baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun kepada masyarakat, terlihat pada intensitas kegiatan pembinaan selama ini masih kurang
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang seperti peninjauan kembali RTRW Kabupaten yang menjadi dasar untuk pembuatan turunan penataan ruang dan dasar pemberian izin (IMB, izin prinsip dan izin lokasi) masih lambat, sehingga mengganggu proses pelayanan perijinan kepada masyarakat.
3. Masih lemahnya pengawasan penataan ruang, sehingga banyak terjadi penyimpangan seperti bangunan tanpa IMB, terjadi perubahan pemanfaatan bangunan.



4. Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pelanggaran pemanfaatan ruang.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

**d. Bidang Jasa Konstruksi**

1. Masih kurangnya pembinaan terhadap desain bangunan yang pro lingkungan.
2. Masih adanya Badan Usaha Jasa Konstruksi tenaga teknis yang merangkap tenaga administrasi dan sebagai direktur.

Kurang selektifnya pemberian ijin jasa konstruksi sehingga usaha jasa konstruksi masih memerlukan pembinaan.

**C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagaimana digambarkan pada bagan 1.1 di bawah ini :





## 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 70 Orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural : 23 orang

b. Staf Pelaksana : 47 orang

Kondisi jumlah pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
Jumlah dan Klasifikasi Pegawai Dinas PUPR  
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

| Gol/Pendidikan            | S-2      | S-1       | D-3      | SMA       | SMP      | Jumlah    |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Pembina (IV/a)            | 2        | 1         |          |           |          | 3         |
| Penata Tk I (III/d)       | 4        | 3         |          | 1         |          | 8         |
| Penata (III/c)            | 1        | 6         |          | 1         |          | 8         |
| Penata Muda Tk I (III/b)  |          | 8         |          | 4         |          | 12        |
| Penata Muda (III/a)       |          | 12        | 1        | 2         |          | 15        |
| Peangatur Tk I (II/d)     |          |           |          | 9         |          | 9         |
| Pengatur (II/c)           |          |           | 1        | 11        | 1        | 13        |
| Pengatur Muda Tk.I (II/b) |          |           |          | 1         | 1        | 2         |
| <b>JUMLAH</b>             | <b>7</b> | <b>30</b> | <b>2</b> | <b>29</b> | <b>2</b> | <b>70</b> |



#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2019. Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut: BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas pokok dan fungsi, isu strategis, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021, Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2019.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2019 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yang akan diambil. Selain itu juga dilaporkan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur.



# BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.

#### 1. Pernyataan Visi

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah ***“Infrastruktur yang baik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.”***

#### 2. Pernyataan Misi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ***misi*** sebagai penjabaran dari visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung kedaulatan pangan dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Meningkatkan pemanfaatan, pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis daerah secara terpadu, selaras, berlanjut, berdayaguna dan berhasil guna.



4. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi kepada penyedia barang dan jasa yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam LKjiP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai Sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan
3. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota
4. Meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa yang profesional dan berintegritas
5. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.





Sedangkan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar
2. Menciptakan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten
4. Meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa sesuai profesi di sektor jasa konstruksi yang berdaya saing secara global
5. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

#### **4. Program dan Kegiatan**

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari kegiatan :
  - a. Perencanaan Jalan
  - b. Pembangunan Jalan
  - c. Perencanaan Jembatan
  - d. Pembangunan Jembatan
  - e. Pengawasan Jalan
  - f. Pengawasan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, terdiri dari kegiatan :
  - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
  - b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/



- Gorong-gorong
- c. Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/  
Gorong-gorong
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, terdiri dari kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
  - b. Operasional UPTD-ALKAL
- 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, terdiri dari kegiatan
  - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - b. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah di Bangun
- 5. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari kegiatan
  - a. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
  - b. Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  - c. Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
  - d. Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur
- 6. Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri dari kegiatan
  - a. Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7. Program Pengendalian Tata Ruang, terdiri dari kegiatan
  - a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
- 8. Program Pengawasan Jasa Konstruksi, terdiri dari kegiatan
  - a. Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi tenaga kerja terampil
- 9. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi, terdiri dari kegiatan



- a. Bimtek dan Pelatihan Ke PU an
- b. Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

## **5. Sasaran Program**

Sasaran program menunjukkan berfungsinya output pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sasaran Program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar.
2. Menciptakan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten.
4. Meningkatnya kompetensi penyedia barang dan jasa yang kapabel, profesional dan berintegasi.
5. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

## **6. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap
2. Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi
3. Persentase rekomendasi kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota



## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 untuk seluruh indikator yang ada pada sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sesuai dengan target kinerja. Berikut ini dapat disampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 255.870.123.816 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.603.475.816 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 250.266.648.000. sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar            | Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap | 61.29% |
| 2  | Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan                               | Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi                    | 36%    |
| 3  | Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten | Persentase rekomendasi kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota               | 100%   |
| 4  | Meningkatnya kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel, Profesional dan Berintegritas                       | Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi             | 85%    |
|    |  | Persentase peningkatan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan     | 64%    |
| 5  | Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan  | Skor IKM   | 76     |
|    |  | Nilai AKIP   | 65     |
|    |  | Laporan Keuangan   | Sesuai |



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan maupun sanksi kepada pelaksana kegiatan guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun



kegagalan pencapaian kinerja. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan permasalahan dan solusi dalam mengejar pencapaian target kinerja sampai dengan akhir periode renstra 2016-2021.

Beberapa hal yang perlu dianalisa dan dievaluasi dalam pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan pada masing-masing sasaran dan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Capaian Kinerja Tahun 2019

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target 2019 | Realisasi |        | % Capaian |
|--|--|-------------|-----------|--------|-----------|
|  |  |             | 2018      | 2019   |           |
| Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar            | Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap | 61.29%      | 59,04%    | 70,97% | 115,79    |
| Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan                               | Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi                    | 36%         | 34,02%    | 37,5%  | 104,17    |
| Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten | Persentase rekomendasi kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota               | 100%        | 100%      | 100%   | 100       |
| Meningkatnya kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel, Profesional dan Berintegritas                       | Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi             | 85%         | 80%       | 85%    | 100       |
|  | Persentase peningkatan sistem informasi  | 64%         | 60%       | 62%    | 99,88     |



|   |  |        |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
|   | pembinaan jasa konstruksi di kecamatan |        |        |        |        |
| Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Skor IKM                               | 76     | 73     | 78     | 102,63 |
|   | Nilai AKIP                             | 65     | CC     | 55,47  | 85,34  |
|   | Laporan Keuangan                       | Sesuai | Sesuai | Sesuai | 100    |

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indicator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya ditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja

| NO | JUMLAH NILAI              | KATEGORI        |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Lebih dari 85 %           | Sangat Berhasil |
| 2  | 70 % s.d kurang dari 85 % | Berhasil        |
| 3  | 55 % s.d kurang dari 70 % | Cukup           |
| 4  | Kurang dari 55 %          | Kurang          |

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja, Pengukuran Kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan

untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang di tuangkan dalam formulir PK, di lanjutkan dengan menggunakan formulir EK 1, EK 2 dan EK 3, sedangkan indikator kinerja dapat meliputi *inputs, outputs, outcomes*.

Dari tabel pengukuran kinerja diatas dapat di jelaskan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 dari masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar

**Tabel 3.3**  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | %      |
|--|--------|-----------|--------|
| Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap | 61,29% | 70,97%    | 115,79 |

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2019 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas sudah memenuhi target sebesar 61,29% dengan realisasi sebesar 70,97% dimana dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 93 desa/kelurahan terdapat 66 desa/kelurahan yang sudah terhubung ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap, untuk lebih rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

- Tahun 2019 panjang jalan kabupaten sepanjang 1177,77 Km sesuai dengan SK Bupati Nomor 626 Tahun 2017





tertanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Jalan Kabupaten.

Untuk jalan dengan kondisi mantap sepanjang 903,82 Km dari panjang seluruh jalan kabupaten ( 1177,77 Km) atau sebesar 76,74% dengan melaksanakan program peningkatan jalan ditahun 2019 sepanjang 80,359 Km dan perbaikan panjang ruas jalan (fungsional) dengan menggunakan alat berat UPTD sepanjang 84,65 Km di kecamatan-kecamatan.

- Pembangunan jembatan yang telah dikerjakan pada tahun 2019 sebanyak 10 unit, sehingga sampai dengan tahun 2019 total jembatan dengan kondisi baik sebanyak 169 unit dari total jembatan sebanyak 525 unit atau sebesar 32,19%.
- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang sudah dikerjakan tahun 2019 sebanyak 29 unit box culvert atau sepanjang 174 meter

2. Menciptakan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan

**Tabel 3.4**  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %      |
|---|--------|-----------|--------|
| Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi | 36%    | 37,50%    | 104,17 |

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2019 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas sudah memenuhi dari target sebesar 36% telah terealisasi sebesar 37,50% dimana dari jumlah luas sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 169,531Ha terdapat 63,574Ha yang sudah teraliri



oleh jaringan irigasi, untuk lebih rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun 2019 melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan telah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 94,06 Km dalam bentuk kegiatan rehab dan pemeliharaan sedangkan dari Total luas irigasi kabupaten sebesar 44.100 Ha terdapat 78,29% Jaringan irigasi dalam kondisi baik atau sebesar 34.524,38 Ha.

3. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten

**Tabel 3.5**  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | %   |
|--|--------|-----------|-----|
| Persentase rekomendasi kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota | 100 %  | 100 %     | 100 |

Untuk tahun 2018 pencapaian kinerja untuk kesesuaian kegiatan pembangunan terhadap tata ruang mencapai 100 % dimana untuk setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian RTRW yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

4. Meningkatnya kompetensi penyedia barang dan jasa yang kapabel, professional dan berintegritas

**Tabel 3.6**  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | %   |
|--|--------|-----------|-----|
| Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi | 85 %   | 85 %      | 100 |



|  |      |      |       |
|--|------|------|-------|
| Persentase Peningkatan system informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan | 64 % | 62 % | 96,88 |
|--|------|------|-------|

5. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

**Tabel 3.6**  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %      |
|-------------------|--------|-----------|--------|
| Skor IKM          | 76     | 78        | 102,63 |
| Nilai AKIP        | 65     | 55,47     | 85,34  |
| Laporan Keuangan  | Sesuai | Sesuai    | 100    |

### C. REALISASI KEUANGAN

Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 15 Program dan 48 Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 255.870.123.816 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.603.475.816 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 250.266.648.000. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 secara umum dapat dilaksanakan semua dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 235.355.696.972 (91,98%) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.389.365.743 (96,18%) dan belanja langsung sebesar Rp. 229.966.331.229 (91,89%).



**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2019**

| PROGRAM DAN KEGIATAN          |   | PAGU<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2019 | REALISASI              | %            |
|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                             |   | 2                              | 3                      | 4            |
| <b>BELANJA DAERAH</b>         |   | <b>255.870.123.816</b>         | <b>235.355.696.972</b> | <b>91,98</b> |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> |   | <b>5.603.475.816</b>           | <b>5.389.365.743</b>   | <b>96,18</b> |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>       |   | <b>250.266.648.000</b>         | <b>229.966.331.229</b> | <b>91,89</b> |
| <b>1</b>                      | <b>PROGRAM PELAYANAN<br/>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>               | <b>2.652.615.550</b>           | <b>2.409.759.632</b>   | <b>90,84</b> |
| 1                             | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                      | 12.105.000                     | 12.105.000             | 100          |
| 2                             | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik          | 72.000.000                     | 59.352.345             | 82,43        |
| 3                             | Penyediaan Jasa Administrasi<br>Keuangan                            | 881.250.000                    | 745.290.000            | 84,57        |
| 4                             | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                   | 11.106.900                     | 11.106.900             | 100          |
| 5                             | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 73.748.650                     | 73.748.650             | 100          |
| 6                             | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                          | 43.800.000                     | 43.497.500             | 99,31        |
| 7                             | Penyediaan komponen instalasi<br>listrik/penerangan bangunan kantor | 10.814.000                     | 10.814.000             | 100          |
| 8                             | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-Undangan         | 5.000.000                      | 4.970.000              | 99,40        |
| 9                             | Penyediaan Makanan dan Minuman                                      | 51.000.000                     | 51.000.000             | 100          |
| 10                            | Rapat - Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi Luar Daerah              | 375.591.000                    | 375.565.237            | 99,99        |
| 11                            | Penataan File Kepegawaian   | 1.026.200.000                  | 932.500.000            | 90,87        |
| 12                            | Rapat - Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi Dalam Daerah             | 90.000.000                     | 89.810.000             | 99,79        |
| <b>2</b>                      | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>SARANA DAN PRASARANA<br/>APARATUR</b>    | <b>10.094.801.579</b>          | <b>4.026.564.171</b>   | <b>39,89</b> |
| 13                            | Pemeliharaan Rutin Berkala Aset<br>Pemda                            | 1.736.212.900                  | 1.732.561.200          | 99,79        |
| 14                            | Pembangunan Gedung Kantor   | 200.000.000                    | 199.200.000            | 99,60        |
| 15                            | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas/Operasional                            | 58.000.000                     | 54.600.000             | 94,14        |
| 16                            | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                   | 580.975.679                    | 575.317.300            | 99,03        |
| 17                            | Pengadaan Mebeulair   | 103.491.000                    | 102.120.000            | 98,68        |
| 18                            | Pemeliharaan Rutin/Berkala<br>Kendaraan Dinas/Operasional           | 334.122.000                    | 284.972.607            | 85,29        |
| 19                            | Pemeliharaan Rutin/Berkala<br>Perlengkapan Gedung Kantor            | 73.000.000                     | 73.000.000             | 100          |
| 20                            | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung<br>Kantor                          | 595.000.000                    | 592.410.064            | 99,56        |



|          |   |                        |                        |              |
|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 21       | Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor   | 14.000.000             | 13.883.000             | 99,16        |
| 22       | Pengadaan Alat - Alat Berat   | 6.400.000.000          | 398.500.000            | 6,23         |
| <b>3</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>  | <b>74.300.000</b>      | <b>68.400.000</b>      | <b>92,06</b> |
| 23       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | 74.300.000             | 68.400.000             | 92,06        |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             | <b>150.000.000</b>     | <b>149.500.000</b>     | <b>99,67</b> |
| 24       | Pengembangan SDM  | 150.000.000            | 149.500.000            | 99,67        |
| <b>5</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>18.000.000</b>      | <b>18.000.000</b>      | <b>100</b>   |
| 25       | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           | 18.000.000             | 18.000.000             | 100          |
| <b>6</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>10.000.000</b>      | <b>10.000.000</b>      | <b>100</b>   |
| 26       | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )  | 10.000.000             | 10.000.000             | 100          |
| <b>7</b> | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>   | <b>188.341.725.621</b> | <b>176.682.487.867</b> | <b>93,81</b> |
| 27       | Perencanaan Jalan   | 2.780.769.000          | 2.648.195.000          | 95,23        |
| 28       | Pembangunan Jalan   | 149.447.103.080        | 139.296.369.326        | 93,21        |
| 29       | Perencanaan Jembatan  | 3.198.100.000          | 3.075.924.000          | 96,18        |
| 30       | Pembangunan Jembatan  | 28.005.471.541         | 27.157.375.541         | 96,97        |
| 31       | Pengawasan Jalan  | 4.179.782.000          | 3.780.109.000          | 90,44        |
| 32       | Pengawasan Jembatan   | 730.500.000            | 724.515.000            | 99,18        |
| <b>8</b> | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG</b>                         | <b>7.397.000.000</b>   | <b>7.309.124.000</b>   | <b>98,81</b> |
| 33       | Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong  | 7.000.000.000          | 6.924.058.000          | 98,92        |
| 34       | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong                            | 183.000.000            | 173.173.000            | 94,63        |
| 35       | Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong                             | 214.000.000            | 211.893.000            | 99,02        |
| <b>9</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>                         | <b>7.907.970.250</b>   | <b>7.507.885.727</b>   | <b>94,94</b> |



|           |   |                       |                       |              |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 36        | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat   | 300.000.000           | 299.534.000           | 99,84        |
| 37        | Operasional UPTD - ALKAL  | 7.607.970.250         | 7.208.351.727         | 94,75        |
| <b>10</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI , RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINYA</b>                         | <b>30.829.110.000</b> | <b>29.139.681.622</b> | <b>94,52</b> |
| 38        | Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi  | 28.449.102.000        | 26.764.012.500        | 94,08        |
| 39        | Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun  | 2.380.008.000         | 2.375.669.122         | 99,82        |
| <b>11</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>   | <b>1.470.750.000</b>  | <b>1.352.063.044</b>  | <b>91,93</b> |
| 40        | Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan   | 366.875.000           | 359.322.500           | 97,94        |
| 41        | Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. | 372.375.000           | 367.510.342           | 98,69        |
| 42        | Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis   | 530.750.000           | 475.385.476           | 89,57        |
| 43        | Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur   | 200.750.000           | 149.844.726           | 74,64        |
| <b>12</b> | <b>PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI</b>   | <b>68.500.000</b>     | <b>68.000.000</b>     | <b>99,27</b> |
| 44        | Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil   | 68.500.000            | 68.000.000            | 99,27        |
| <b>13</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI</b>   | <b>331.500.000</b>    | <b>319.619.650</b>    | <b>96,42</b> |
| 45        | Bimtek dan Pelatihan ke - PU an   | 302.300.000           | 291.819.650           | 96,53        |
| 46        | Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi   | 29.200.000            | 27.800.000            | 95,21        |
| <b>14</b> | <b>PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG</b>   | <b>449.625.000</b>    | <b>445.257.919</b>    | <b>99,03</b> |
| 47        | Koordinasi Penataan Ruang Kab.Tanjung Jabung Timur  | 449.625.000           | 445.257.919           | 99,03        |
| <b>15</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG</b>  | <b>470.750.000</b>    | <b>459.987.597</b>    | <b>97,71</b> |
| 48        | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten   | 470.750.000           | 459.987.597           | 97,71        |



# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.



Hasil Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana.
2. Dari analisis 5 (lima) sasaran terdapat 8 (delapan) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) indikator kinerja telah tercapai target dengan rata-rata lebih 100%.

## **B. SARAN**

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumber daya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana dan prasarana serta fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi peneraapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran Instansi Pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja.
3. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur disamping factor tersebut diatas kedepan wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang infrastruktur serta dukungan anggaran dari APBD yang proporsional.





Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

